



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN
2023



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

T.A. 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN



Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu



www.waykanankab.go.id



(0723) – 461001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Tabik Pun

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang telah dirangkum dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sebagai bentuk perwujudan transparansi serta informasi penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada publik/masyarakat yang mencakup gambaran dan penjelasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Way Kanan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditahun 2022. Dengan adanya laporan ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai capaian kinerja yang telah diraih, permasalahan dan kendala yang dihadapi, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Way Kanan. Akhir kata, Semoga apa yang tercantum dalam dokumen laporan ini mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan informasi dan masukan/saran bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dimasa datang dalam mewujudkan Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Blambangan Umpu, 30 Maret 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan informasi utama keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan Kepala Daerah kepada publik/masyarakat. Kewajiban Kepala Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/ atau media elektronik. Dasar hukum dalam penyusunan RLPPD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi daerah. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, dan disusun berdasarkan prinsip (a) transparansi, (b) akuntabilitas, (c) akurasi dan (d) objektif.

Berdasarkan hal tersebut maka Kami sampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana berikut :



A. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan Nasional. Adapun capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1
Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kab. Way Kanan Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
		2021	2022	
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,57	68,04	0,70
2	Angka Kemiskinan	13,09	11,76	-10,16
3	Angka Pengangguran	3,36	3,28	-2,38
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,90	4,41	52,07
5	Pendapatan Per Kapita	30.746.033	33.579.502	9,22
6	Ketimpangan Pendapatan	0,283	0,283	0

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kabupaten Way Kanan terus mengalami kemajuan dan peningkatan, dimana hal ini ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Way Kanan mencapai 68,04, Angka ini meningkat sebesar 0,47 poin atau tumbuh 0,70 persen dibandingkan dengan IPM ditahun 2021 yang sebesar 67,57. Peningkatan ini terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran perkapita yang disesuaikan. IPM Kabupaten Way Kanan masih berada di bawah level Provinsi Lampung yang besarnya 70,45. IPM Kabupaten Way Kanan menduduki peringkat ke-10 dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Gambaran kondisi Komponen IPM Kabupaten Way Kanan tersaji pada tabel berikut :

Tabel. 2
Kondisi Komponen IPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 – 2022

Komponen IPM	2020	2021	2022
1. Angka Harapan Hidup (tahun)	69,40	69,46	69,69
2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,36	12,37	12,42
3. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,70	7,71	7,72
4. Pengeluaran Per kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	9.102	9.173	9.450

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

2. Angka Kemiskinan

Selama sepuluh tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Way Kanan cenderung mengalami trend yang signifikan menurun, namun pada Tahun 2021 angka kemiskinan mengalami kenaikan berada pada level 13,09%, hal ini terjadi disebabkan karena mewabahnya virus Covid-19 yang berimbas pada peningkatan kemiskinan, namun ditahun 2022 mampu ditekan kembali hingga berada pada level 11,76. Adapun perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Way Kanan sebagaimana berikut :



Tabel. 3
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 – 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2013	276.091	65,18	15,36
2014	286.518	64,50	15,03
2015	291.207	63,09	14,61
2016	313.733	63,64	14,58
2017	323.691	62,00	14,06
2018	333.033	60,16	13,52
2019	341.012	58,72	13,07
2020	377.712	58,41	12,90
2021	389.088	59,89	13,09
2022	409.522	54,28	11,76

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kabupaten Way Kanan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini :





Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Indonesia. Berdasarkan data BPS Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019 tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Manufaktur dan Jasa. Dimana kontribusi kategori Pertanian terhadap penduduk bekerja menurut lapangan usaha merupakan yang tertinggi yaitu sebanyak 153.217 orang, kemudian kategori Jasa sebanyak 62.377 orang dan kategori Manufaktur sebanyak 23.142 orang.

**Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan
di Kabupaten Way Kanan, 2019**

Status Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
Pertanian	153.217
Jasa	62.377
Manufaktur	23.142

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan, Susenas, Maret 2019

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2022, nilai PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp.16.152.949,2 miliar, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, mencapai Rp.10.165.597,7 miliar. Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 naik menjadi 4,41% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 2,90%. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 aktivitas ekonomi sudah mulai stabil seiring dengan proses pemulihan ekonomi akibat covid-19. Pada tahun 2022 hampir semua sektor lapangan usaha mengalami kenaikan kecuali pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (-1,39%) dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (-1,17%). Penyebab menurunnya pertumbuhan pada sektor Jasa Keuangan adalah adanya penurunan nilai pendapatan pada perbankan umum di Provinsi



Lampung, sementara penurunan pada sektor Jasa Kesehatan dikarenakan penurunan penggunaan anggaran yang pada tahun sebelumnya untuk penanggulangan bencana covid-19.

Tabel. 4
Laju Pertumbuhan PDRB Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2020
Menurut Lapangan Usaha (persen) 2021 – 2022

Lapangan Usaha	Tahun	
	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,19	2,92
Pertambangan dan Penggalian	-0,10	5,74
Industri Pengolahan	5,79	1,75
Pengadaan Listrik dan Gas	4,14	5,76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,34	3,76
Konstruksi	7,55	1,21
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2,58	11,96
Transportasi dan Pergudangan	2,36	22,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,71	6,04
Informasi dan Komunikasi	6,80	5,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,12	-1,39
Real Estat	1,31	0,02
Jasa Perusahaan/	1,05	0,01
Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,20	0,08
Jasa Pendidikan	1,39	9,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,38	-1,17
Jasa lainnya	-1,89	27,15
Produk Domestik Regional Bruto	2,90	4,41

Sumber : PDRB Kabupaten Way Kanan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah itu

memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Adapun perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 5
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Way Kanan 2018 – 2022

PDRB PERKAPITA	PDRB Perkapita (Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Perkapita ADHB	29 264 425	31 061 790	29 531 799	30 746 033	33 579 502
PDRB Perkapita ADHK 2010	20 404 874	21 270 005	19 980 593	20 417 471	21 132 717

Tabel. 6
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Way Kanan

Lapangan Usaha (Utama)	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3 257 026,24	3 263 311,29	3 358 479,32
Pertambangan dan Penggalian	448 233,01	447 804,00	473 497,85
Industri Pengolahan	1 986 556,89	2 101 490,46	2 138 234,11
Pengadaan Listrik dan Gas	10 778,78	11 225,00	11 871,78
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 439,49	5 621,20	5 832,36
Konstruksi	825 743,08	888 113,50	898 845,54
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1 004 179,63	1 030 045,90	1 153 233,62
Transportasi dan Pergudangan	261 189,82	267 365,68	328 083,43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76 041,46	74 740,60	79 257,53
Informasi dan Komunikasi	475 131,50	507 423,50	537 705,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	93 160,53	96 062,90	94 727,06
Real Estat	238 722,62	241 845,00	241 893,29
Jasa Perusahaan	4 811,53	4 862,10	4 862,42
Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	321 923,60	335 447,70	335 726,82
Jasa Pendidikan	293 992,41	298 085,20	327 565,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106 733,98	111 405,80	110 106,84
Jasa lainnya	52 644,62	51 650,20	65 674,78
Produk Domestik Regional Bruto	9 462 309,19	9 736 500,03	10 165 597,71

Sumber : <https://waykanankab.bps.go.id/indicator/52/551/1/pdrb-harga-konstan.html>



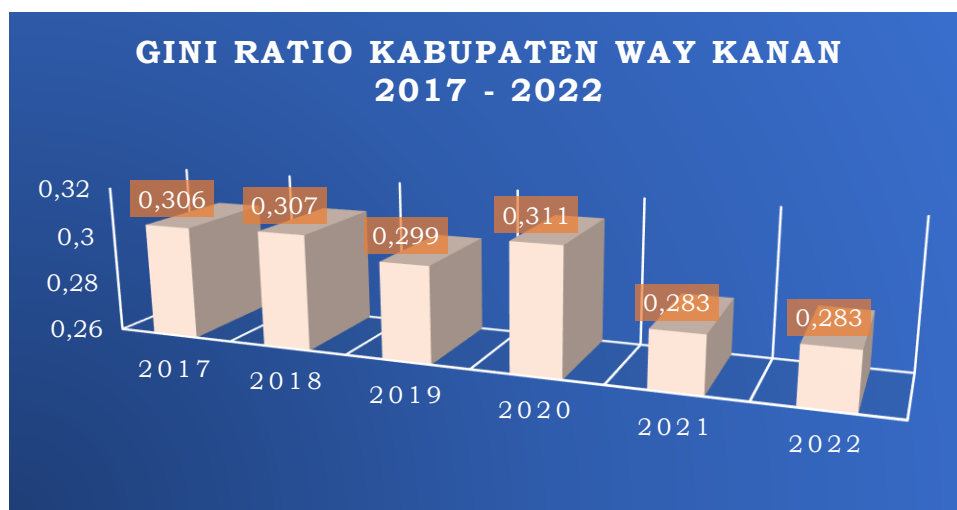
Tabel. 7
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Way Kanan

Lapangan Usaha (Utama)	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4 965 974,63	5 087 228,00	5 769 671,91
Pertambangan dan Penggalian	675 102,57	682 509,00	740 935,21
Industri Pengolahan	3 061 283,53	3 332 342,70	3 479 731,25
Pengadaan Listrik dan Gas	13 426,97	14 467,00	15 418,41
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8 140,60	8 500,00	8 905,34
Konstruksi	1 142 815,51	1 256 034,00	1 310 749,89
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1 397 068,78	1 458 795,00	1 702 806,73
Transportasi dan Pergudangan	371 597,28	388 232,71	518 972,43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	127 866,22	126 545,70	136 188,46
Informasi dan Komunikasi	589 488,07	611 852,00	650 411,85
Jasa Keuangan dan Asuransi	141 795,74	153 865,20	161 950,36
Real Estat	316 982,76	323 350,00	326 224,88
Jasa Perusahaan	7 148,73	7 269,20	7 353,61
Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	492 115,43	511 328,00	536 225,06
Jasa Pendidikan	448 451,50	464 248,00	515 256,34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151 179,40	161 095,00	175 010,60
Jasa lainnya	75 084,01	74 230,00	97 136,86
Produk Domestik Regional Bruto	13 985 521,71	14 661 891,51	16 152 949,21

Sumber : <https://waykanankab.bps.go.id/indicator/52/551/1/pdrb-harga-berlaku.html>

6. Ketimpangan Pendapatan / Gini Ratio

Gini Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Selama tahun 2017-2020 nilai Gini Ratio Kabupaten Way Kanan mengalami fluktuatif, dimana ditahun 2017 nilai Gini Ratio sebesar 0,306 naik sedikit ditahun 2018 menjadi 0,307, kemudian ditahun 2019 menjadi 0,299 naik lagi ditahun 2020 menjadi 0,311. Namun selama tahun 2021-2022 nilai Gini Ratio Kabupaten Way Kanan terjadi stagnan di angka 0,283.



Sumber : <https://lampung.bps.go.id/indicator/23/632/1/gini-ratio-kabupaten-kota.html>

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung, Angka Rasio Gini Kabupaten Way Kanan tahun 2022 berada di posisi ke-9 namun memiliki nilai yang sama dengan Kabupaten Lampung Timur yang berada pada posisi ke-8.

Tabel. 8
Gini Ratio Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2022

No.	Wilayah	Gini Ratio 2022
	Provinsi Lampung	0,314
1	Bandar Lampung	0,369
2	Metro	0,299
3	Lampung Tengah	0,299
4	Pesisir Barat	0,290
5	Tulang Bawang	0,287
6	Lampung Barat	0,284
7	Lampung Utara	0,284
8	Lampung Timur	0,283
9	Way Kanan	0,283
10	Mesuji	0,280
11	Pringsewu	0,272
12	Tulang Bawang Barat	0,261
13	Tanggamus	0,261
14	Lampung Selatan	0,260
15	Pesawaran	0,251

Sumber : <https://lampung.bps.go.id/indicator/23/632/1/gini-ratio-kabupaten-kota.html>



B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 meliputi 6 (enam) urusan yaitu : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan 6) Sosial.

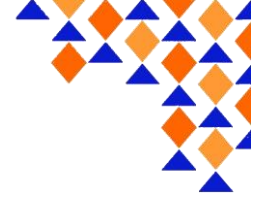
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, berikut kami sampaikan capaian kinerja 6 (enam) Urusan Pelayanan Dasar Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 :

Tabel. 9
Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		
			RUMUS/PERSAMAAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
URUSAN PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	13.625	78.98%
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	17.251	
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	53.078	96.54%
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	54.979	
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	23.382	90.52%
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	25.832	



	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	415	92.84%
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	447	
URUSAN KESEHATAN	5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	209	0,04%
			Jumlah Penduduk di Kabupaten	483.884	
	6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi minimal tingkat utama	2	100%
			Jumlah RS di Kabupaten	2	
	7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7.911	91.31%
			Jumlah ibu hamil di Kabupaten	8.664	
	8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	7.661	92.64%
			Jumlah ibu bersalin di Kabupaten	8.270	
	9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	7.429	94.32%
			Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten	7.876	
	10	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	33.084	86.48%
Jumlah balita di Kabupaten			38.258		
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	16.533	98.32%	
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten	16.816		



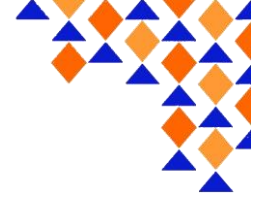
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	209.861	70.80%
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	296.431	
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	45.600	93.08%
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	48.990	
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72.447	59.08%
		Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	122.625	
15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.691	90.54%
		Jumlah penderita DM di Kabupaten	5.181	
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	624	79.39%
		Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	786	
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.386	92.61%
		Jumlah penderita TBC di Kabupaten	5.816	
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	8.612	99.4%
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	8.664	



URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	0	0,00
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten	0	
	20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	0	0,00
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten	0	
	21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)	250	5.051%
			Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten	4.950	
	22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten	87.094	55.32%
			Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut	157.441	



	23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	84.484	53.66%
			Jumlah rumah di Kabupaten	157.441	
	24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	67	100%
			Jumlah IMB yang berlaku	67	
	25	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap	765.662	38.09%
			Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten	2009.892	
	26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	40	0,00%
			Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten	0	
	27	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	0,00%
			Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	56	70%
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	80	



	29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0,00	
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0		
	30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	2,66	30.29%	
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	8.781		
	31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni	7.936	5.06%	
			Jumlah total unit rumah Kabupaten	156.942		
	32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun dan atau sudah terfasilitasi PSU	0	0.00%	
			Jumlah unit rumah Kabupaten	156.942		
	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	8	100%
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	8	
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	6	100%
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	6	



	35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.342	100%
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	2.342	
	36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	512	100%
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	512	
	37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.136	100%
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	1.136	
	38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan PD	10	100%
			Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten	10	



	39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran	30	30 Menit
URUSAN SOSIAL	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	564	1.86%
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	30.287	
	41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	100	8.80%
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	1.136	

Sumber : LPPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

C. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Berikut ini kami sampaikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Way Kanan.



Tabel. 10
Hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Skor	Kategori	Peringkat Nasional	Ket.
1	Hasil EPPD atas LPPD Tahun 2014	2,6527	Tinggi	215	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 800-35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Thn 2014
2	Hasil EPPD atas LPPD Tahun 2015	2,8224	Tinggi	227	Kepmendagri Nomor 120-10421 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Thn 2015
3	Hasil EPPD atas LPPD Tahun 2016	2,9928	Tinggi	197	Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Thn 2016
4	Hasil EPPD atas LPPD Tahun 2017	2,9852	Tinggi	120	Kepmendagri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Thn 2017
5	Hasil EPPD atas LPPD Tahun 2018	3,1951	Sangat Tinggi		Piagam Penghargaan dari Mendagri Tanggal 25 April 2020

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan

Catatan : Untuk Tahun 2019 – 2022 belum ada release/Keputusan terkait evaluasi LPPD oleh Kemendagri RI





Tabel. 11
Opini BPK atas LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 – 2022

No	Uraian	Opini
1	Opini BPK atas LKPD Tahun 2013	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2	Opini BPK atas LKPD Tahun 2014	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	Opini BPK atas LKPD Tahun 2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	Opini BPK atas LKPD Tahun 2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5	Opini BPK atas LKPD Tahun 2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
6	Opini BPK atas LKPD Tahun 2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
7	Opini BPK atas LKPD Tahun 2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
8	Opini BPK atas LKPD Tahun 2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
9	Opini BPK atas LKPD Tahun 2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10	Opini BPK atas LKPD Tahun 2022	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan tahun 2023

Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia Kepada Kabupaten Way Kanan Atas Capaian Opini WTP Minimal 10 kali Berturut-turut Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 s.d 2021





D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1) Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.359.668.693.272,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.315.923.276.417,44 atau 96,78%. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. 12
Realisasi Pendapatan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022

PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah	83.987.101.272	77.207.443.440,44	91,93
Pendapatan Transfer	1.275.331.592.000	1.238.353.177.867	97,10
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	350.000.000	362.655.110	103,62
JUMLAH PENDAPATAN	1.359.668.693.272	1.315.923.276.417,44	96,78

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Perbandingan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. 13
Realisasi Pendapatan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dan 2022

PENDAPATAN	2021	2022	%
Pendapatan Asli Daerah	70.125.340.980,24	77.207.443.440,44	10,10
Pendapatan Transfer	1.165.980.361.109,00	1.238.353.177.867,00	6,21
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	61.734.644.661,50	362.655.110,00	-99,41
JUMLAH PENDAPATAN	1.297.840.346.750,74	1.315.923.276.417,44	1,39

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Dari tabel.13 diatas, secara keseluruhan terlihat adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar 10,10%, dan terjadi



penurunan realisasi pendapatan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

2) Realisasi Belanja Daerah

Pada Tahun 2022 alokasi untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.379.412.392.662,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp.1.298.574.588.545,06 atau 94,14% secara rinci uraian target dan realisasi belanja dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel. 14
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1. Belanja Operasi	979.719.343.504	916.271.710.775,09	93,52
➤ Belanja Pegawai	558.360.429.806	534.392.151.635,00	95,71
➤ Belanja Barang dan Jasa	391.760.997.455	356.755.418.938,54	91,06
➤ Belanja Hibah	26.047.916.243	24.058.640.201,55	92,36
➤ Belanja Bantuan Sosial	3.550.000.000	1.065.500.000,00	30,01
2. Belanja Modal	117.606.351.158	109.112.638.013,92	92,78
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.400.759.621	55.314.540.599,00	98,07
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.005.020.949	11.822.755.924,32	98,48
➤ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.407.244.322	40.047.446.424,60	94,44
➤ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.358.300.000	1.927.895.066,00	35,98
➤ Belanja Modal Aset Lainnya	1.435.026.266	0,00	0,00
3. Belanja Tak Terduga	3.000.000.000	1.518.368.696,00	50,61
➤ Belanja Tak Terduga	3.000.000.000	1.518.368.696,00	50,61
4. Belanja Transfer	279.086.698.000	271.671.871.060,05	97,34
➤ Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000	2.442.623.850,00	97,70
➤ Belanja Bantuan Keuangan	276.586.698.000	269.229.247.210,05	97,34
JUMLAH BELANJA	1.379.412.392.662	1.298.574.588.545,06	94,14

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023



Adapun perbandingan realisasi belanja daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 15
Perbandingan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun Anggaran 2021 – 2022

URAIAN	2021	2022	%
1. Belanja Operasi	843.116.959.951,65	916.271.710.775,09	93,52
➤ Belanja Pegawai	526.647.871.778,00	534.392.151.635,00	95,71
➤ Belanja Barang & Jasa	290.609.641.626,65	356.755.418.938,54	91,06
➤ Belanja Hibah	17.033.813.768,00	24.058.640.201,55	92,36
➤ Belanja Bantuan Sosial	3.355.000.000,00	1.065.500.000,00	30,01
2. Belanja Modal	111.193.038.962,31	109.112.638.013,92	92,78
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.568.260.902,00	55.314.540.599,00	98,07
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.355.850.393,19	11.822.755.924,32	98,48
➤ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.905.895.767,12	40.047.446.424,60	94,44
➤ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	148.840.000,00	1.927.895.066,00	35,98
➤ Belanja Modal Aset Lainnya	214.191.900,00	0,00	0,00
3. Belanja Tak Terduga	0	1.518.368.696,00	50,61
➤ Belanja Tak Terduga	0	1.518.368.696,00	50,61
4. Belanja Transfer	270.276.168.383,00	271.671.871.060,05	97,34
➤ Belanja Bagi Hasil	2.450.000.000,00	2.442.623.850,00	97,70
➤ Belanja Bantuan Keuangan	267.826.168.383,00	269.229.247.210,05	97,34
JUMLAH BELANJA	1.224.586.167.296,96	1.298.574.588.545,06	94,14

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

3) Realisasi Pembiayaan

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan, maka pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 22.243.699.390,- dari target yang direncanakan tersebut telah terealisasi Rp. 22.222.549.390,15 atau tercapai 99,90%, sedangkan



pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.500.000.000,00 atau 100%. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp.37.071.237.262,53, secara rinci uraian target dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 16
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
PEMBIAYAAN			
1. Penerimaan Pembiayaan	22.243.699.390,00	22.222.549.390,15	99,90
➢ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.243.699.390,00	22.243.699.390,00	99,90
2. Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100
➢ Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100
3. Pembiayaan Netto	19.743.699.390,00	19.722.549.390,15	99,89
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0	37.071.237.262,53	

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Perbandingan realisasi pembiayaan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 17
Perbandingan Pembiayaan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 – 2022

URAIAN	2021	2022	%
PEMBIAYAAN			
1. Penerimaan Pembiayaan	11.966.713.686,37	22.222.549.390,15	85,70
➢ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.966.713.686,37	22.243.699.390,00	85,88
2. Pengeluaran Pembiayaan	62.977.193.750,00	2.500.000.000,00	-96,03
➢ Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00	150
➢ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	61.977.193.750,00	0	-100
3. Pembiayaan Netto	(51.010.480.063,63)	19.722.549.390,15	-138,66
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	22.243.699.390,15	37.071.237.262,53	66,66

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023



E. INOVASI DAERAH

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2021 dan 2022 telah melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi tersebut diantaranya sebagai berikut :

Tabel. 18
Inovasi Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2022

Inovasi Daerah Tahun 2021				
No	Judul Inovasi	Kematangan	Unit Kerja	Status Terkirim
1	SIDATUK (Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan) Ramik Ragom	138.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terkirim Kemendagri
2	PANEN (Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN)	137.00	Badan Pendapatan Daerah	Terkirim Kemendagri
3	SIAP SETARA (Sistem Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan)	137.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terkirim Kemendagri
4	Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	125.00	Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Terkirim Kemendagri
5	Gerai Pelayanan Perizinan	124.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terkirim Kemendagri
6	SIPPERA (Sistem Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Kampung)	123.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Terkirim Kemendagri
7	SIMASET (Sistem Administrasi Manajemen Aset Berbasis Online)	120.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Terkirim Kemendagri
8	Fasilitasi IRIT UMI (Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dan Usaha Mikro)	120.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terkirim Kemendagri
9	ENGKLEK MENJAUHI KEBIASAAN BERMAIN GEDGET	119.00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Terkirim Kemendagri
10	Klinik HAI PELITA	119.00	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Terkirim Kemendagri
11	SIPERMATA (Sistem Informasi Perencanaan & Manajemen Data)	117.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terkirim Kemendagri



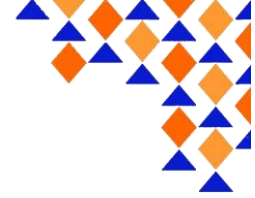
12	AWIG-AWIG INOVASI DALAM AKSELERASI ODF DI KABUPATEN WAY KANAN	116.00	Dinas Kesehatan	Terkirim Kemendagri
13	INOVASI PELAKSANA (Pelatih Aksi Kesiapsiagaan Bencana)	116.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terkirim Kemendagri
14	GEREBEK KAMPUNG	115.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terkirim Kemendagri
15	SIMORA (Sistem Pengembangan MOL-RUMBA)	115.00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan	Terkirim Kemendagri
16	LAYANAN TEMAN METROLOGI (Tepat Mengukur Akurat Nimbang)	112.00	Dinas Industri dan Perdagangan	Terkirim Kemendagri
17	SP2D Online	112.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Terkirim Kemendagri
18	GEBERDIPERUM	111.00	Kecamatan Umpu Semenguk	Terkirim Kemendagri
19	E-KIYAI	109.00	Inspektorat	Terkirim Kemendagri
20	SISTIPAR (Sinergisitas Tiga Pilar) TNI, POLRI dan SATPOL PP	108.00	Satpol PP	Terkirim Kemendagri
21	SIKOP ASN (Sistem Informasi Kepegawaian Online Perubahan ASN)	107.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Terkirim Kemendagri
22	Jaringan Integrasi Internet dan Intranet Tingkat SKPD dan Hotspot Area Publik	107.00	Dinas Kominkasi Dan Informatika	Terkirim Kemendagri
23	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	106.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Terkirim Kemendagri
24	Media Center DPRD Kabupaten Way Kanan	103.00	Sekretariat DPRD	Terkirim Kemendagri
25	SALAM SELALU (Sosialisasi Keselamatan bagi Anak Sekolah dalam Berlalu Lintas)	103.00	Dinas Perhubungan	Terkirim Kemendagri
26	UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan)	101.00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan	Terkirim Kemendagri
27	Ecco Office	101.00	Dinas Lingkungan Hidup	Terkirim Kemendagri



28	Sistem Penggunaan Jadwal Retensi Arsip	101.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Terkirim Kemendagri
29	Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Anak Kampung Sri Basuki	101.00	Kecamatan Negeri Besar	Terkirim Kemendagri
30	LUKAK (Latihan Untuk Angkatan Kerja)	100.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terkirim Kemendagri
31	Sistem Hitung Cepat Internal	100.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terkirim Kemendagri
32	JMC Way Kanan	99.00	Dinas Koperasi dan UKM	Terkirim Kemendagri
33	RUMPI (Unit Layanan Cepat Pertanian Rumah Pintar)	98.00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan	Terkirim Kemendagri
34	REHAB RUMAH RAKYAT (R3)	98.00	Dinas Sosial	Terkirim Kemendagri
35	Optimalisasi Pemungutan BPHTB Berbasis Harmonisasi Regulasi Guna Mengintensifkan Penerimaan BPHTB	93.00	Badan Pendapatan Daerah	Terkirim Kemendagri
36	Strategi Pemberdayaan Pembudidya Ikan dengan Pengembangan Pakan Ikan Mandiri	93.00	Dinas Perikanan	Terkirim Kemendagri
37	GEMPITA KB	92.00	Dinas P2PA dan P2KB	Terkirim Kemendagri
38	Layanan Pendataan dan Sosialisasi Awal Registrasi Produk Pangan Segar Dalam Kemasan	92.00	Dinas Ketahanan Pangan	Terkirim Kemendagri
39	Penerapan Aplikasi Bioteknologi Kopi Robusta	85.00	Dinas Perkebunan	Terkirim Kemendagri
40	Rekomendasi SIUJK dan Surat Laik Fungsi (SLF) Berbasis Elektronik	83.00	Dinas Pekerjaan Umum	Terkirim Kemendagri
41	Ibu Cerdas	74.00	PKM Banjit	Terkirim Kemendagri

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan 2023

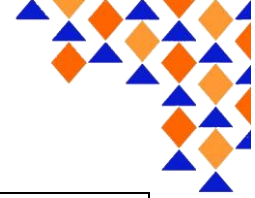
Keterangan : Status Terkirim adalah Inovasi yang telah di input yang memenuhi Indikator dan Parameter Wajib yang telah ditentukan oleh Litbang Kemendagri RI.

**Inovasi Daerah Tahun 2022**

No	Judul Inovasi	Kematangan	Unit Kerja	Status Terkirim
1	PERJAKA MAMI BOS	102.00	Badan Pendapatan Daerah	Terkirim Kemendagri
2	Klinik Inovasi Daerah	98.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terkirim Kemendagri
3	SIAP KERJA	96.00	Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Terkirim Kemendagri
4	SIKANJENG	95.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terkirim Kemendagri
5	EPUSDA	95.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Terkirim Kemendagri
6	TRC SIGANA	94.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terkirim Kemendagri
7	Klinik PUG	93.00	Dinas P2PA dan P2KB	Terkirim Kemendagri
8	RUPUK	92.00	Sekretariat DPRD	Terkirim Kemendagri
9	SI PENTOL	91.00	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Terkirim Kemendagri
10	SAIRAGOM	90.00	Dinas Kominkasi Dan Informatika	Terkirim Kemendagri
11	SIJAPUK	79.00	Dinas Perkebunan	Terkirim Kemendagri
12	DAPOK BERES	79.00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Terkirim Kemendagri
13	SI PRAKA	79.00	SATPOL PP dan DAMKAR	Terkirim Kemendagri
14	KASDAM Bersama MASDUHA	79.00	SATPOL PP dan DAMKAR	Terkirim Kemendagri
15	JMC Way Kanan	78.00	Dinas Koperasi dan UKM	Terkirim Kemendagri
16	SEMARAK PAUD-HI	78.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terkirim Kemendagri



17	MOMENT	78.00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan	Terkirim Kemendagri
18	SIKOPED	77.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Terkirim Kemendagri
19	CERDAS ATASI STUNTING	77.00	Dinas Kesehatan	Terkirim Kemendagri
20	SILADIS	77.00	Dinas Sosial	Terkirim Kemendagri
21	BELAJAR DI RADIO	75.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terkirim Kemendagri
22	SIPADU	73.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Terkirim Kemendagri
23	GASIK	72.00	Dinas Kesehatan	Terkirim Kemendagri
24	Cepat Regu PBG	71.00	Badan Pendapatan Daerah	Terkirim Kemendagri
25	BIO PPTK	71.00	Dinas Perkebunan	Terkirim Kemendagri
26	RAHARJA ONLINE	71.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terkirim Kemendagri
27	E-MONEV DANA DESA	88.00	Kecamatan Negeri Besar	Terkirim Kemendagri
28	RAINBOW Gula Asik	80.00	Kecamatan Gunung Labuhan	Terkirim Kemendagri
29	KESTAR	77.00	Kecamatan Banjit	Terkirim Kemendagri
30	MANJAU JAMA JAMA	75.00	Kecamatan Way Tuba	Terkirim Kemendagri
31	E-MATA DANA DESA	73.00	Kecamatan Negara Batin	Terkirim Kemendagri
32	JIN PELIK	69.00	Kecamatan Rebang Tangkas	Terkirim Kemendagri
33	BERKAH SAMPAH	76.00	Kecamatan Gunung Labuhan	Terkirim Kemendagri
34	LIMBAH PLASTIK	72.00	Kecamatan Gunung Labuhan	Terkirim Kemendagri



35	PANDORA (Panganan Dodol Varian Rasa)	72.00	Kecamatan Gunung Labuhan	Terkirim Kemendagri
36	JANGKRIK	70.00	Kecamatan Gunung Labuhan	Terkirim Kemendagri
37	BANK URIN KAMBING	69.00	Kecamatan Gunung Labuhan	Terkirim Kemendagri
38	UJI KADAR	91.00	Dinas Lingkungan Hidup (UPT LAB)	Terkirim Kemendagri
39	SOSIS	88.00	PKM Mesir Ilir	Terkirim Kemendagri
40	SIMPOLI	88.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPT SKB)	Terkirim Kemendagri
41	TAKAR BESI	83.00	PKM Serupa Indah	Terkirim Kemendagri
42	Rumah Konsultasi dan Pelayanan Pajak	82.00	Badan Pendapatan Daerah (UPT Wilayah I)	Terkirim Kemendagri
43	LACAK KB	79.00	UPT KB	Terkirim Kemendagri
44	PEKOM PAKAI W.A	79.00	Dinas Perhubungan (UPT)	Terkirim Kemendagri
45	SOMPUK (Sampah Organik Menjadi Pupuk)	69.00	Dinas Lingkungan Hidup (UPT)	Terkirim Kemendagri
46	BEGAWI	68.00	PKM Negeri Baru	Terkirim Kemendagri
47	GERCEP HIPTROL	67.00	PKM Rebang Tangkas	Terkirim Kemendagri
48	Penanggulangan DBD OVITRAP	66.00	PKM Bumi Baru	Terkirim Kemendagri

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan 2023

Keterangan : Status Terkirim adalah Inovasi yang telah di input yang memenuhi Indikator dan Parameter Wajib yang telah ditentukan oleh Litbang Kemendagri RI.